

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit, jasa reviu, dan jasa asurans lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Akuntan Publik. Sedangkan Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Daftar Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 20 Mei 2020 adalah sebanyak 781 Akuntan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Bab 2 Pasal 3 juga menyatakan bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, AP dan KAP wajib terlebih dahulu

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 7 dikatakan bahwa AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan.
- b. Menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan.
- c. Menerapkan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 25 menyatakan Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. Dalam Pasal 30, Akuntan Publik dilarang untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Akuntan Publik juga dilarang untuk melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Departemen Keuangan sebagai pengawas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik hampir setiap tahun mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Ijin Akuntan Publik (Dharmawan, 2015). Per tanggal 30 Agustus 2020 terdapat 8 daftar Akuntan Publik yang mendapatkan sanksi pembekuan izin (pppk.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1
Daftar Sanksi Beku & Sanksi Cabut Izin AP

1.	Pembekuan Izin AP Drs. Henry Susanto, CPA, Akuntan Publik
	Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: Pembekuan Keputusan No 158/KM.1/2020 tanggal 19/03/2020 Berlaku dari 16/04/2020 hingga 15/04/2021
2.	Pembekuan Izin AP Drs. Muchamad Ilham, M.Si., CPA, Akuntan Publik
	Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: Pembekuan Keputusan No KMK Nomor 74/KM.1/2020 tanggal 10/02/2020 Berlaku dari 10/03/2020 hingga 09/03/2021
3.	Pembekuan Izin AP Sahat MT, Akuntan Publik

	<p>Jenis Pelanggaran: Standar Profesional</p> <p>Jenis Sanksi: Pembekuan</p> <p>Keputusan No KMK Nomor 73/KM.1/2020 tanggal 10/02/2020</p> <p>Berlaku dari 10/03/2020 hingga 09/03/2021</p>
4.	Pembekuan Izin AP Hari Purnomo, Akuntan Publik
	<p>Jenis Pelanggaran: Standar Profesional</p> <p>Jenis Sanksi: Pembekuan</p> <p>Keputusan No KMK Nomor 778/KM.1/2019 tanggal 23/12/2019</p> <p>Berlaku dari 23/01/2020 hingga 22/01/2021</p>
5.	Pembekuan Izin AP Asmar Effendy Hasibuan, Akuntan Publik
	<p>Jenis Pelanggaran: Standar Profesional</p> <p>Jenis Sanksi: Pembekuan</p> <p>Keputusan No KMK Nomor 762/KM.1/2019 tanggal 16/12/2019</p> <p>Berlaku dari 16/01/2020 hingga 15/07/2021</p>
6.	Pembekuan izin AP Saptoto Agustomo, Akuntan Publik
	<p>Jenis Pelanggaran: Standar Profesional</p> <p>Jenis Sanksi: Pembekuan</p> <p>Keputusan No KMK Nomor 605/KM.1/2019 tanggal 24/10/2019</p> <p>Berlaku dari 24/11/2019 hingga 23/11/2020</p>
7.	Pembekuan Izin AP Drs. M. Lian Dalimunthe, M.Ec., CPA, Akuntan Publik

	Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: Pembekuan Keputusan No KMK Nomor 579/KM.1/2019 tanggal 14/10/2019 Berlaku dari 14/11/2019 hingga 13/11/2020
8.	Pembekuan Izin AP Didik Wahyudianto, Akuntan Publik
	Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: Pembekuan Keputusan No KMK Nomor 437/KM.1/2019 tanggal 14/08/2019 Berlaku dari 12/09/2019 hingga 11/03/2021

(Sumber: pppk.kemenkeu.go.id)

Selain daftar sanksi yang dikenakan kepada Akuntan Publik, kasus juga pernah terjadi pada sejumlah Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Indonesia seperti terjadi pada KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (*Member dari Ernst and Young Global Limited/EY*), dalam Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan No/3/PM.1/2019 tentang Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Hanson International Tbk, Saudara Benny Tjokrosaputro, Saudara Adnan Tabrani, dan Saudari Sherly Jokom, menyatakan bahwa Sdr. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja yang melakukan audit atas LKT PT Hanson International Tbk 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraph A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan

Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia Seksi 130 tentang Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional karena dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit SA 560 terutama pada huruf (b) paragraph 14 terkait penentuan apakah LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 yang mengandung kesalahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif/atau Perintah Tertulis terhadap Sdr. Benny Tjokrosaputro, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terhadap Sdr. Adnan Tabrani, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) terhadap Sdri. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD Nomor: 59/PM.22/STTD-AP/2016 tanggal 18 Februari 2016 telah diperbaharui dengan STTD Nomor: STTD.AP-116/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun.

Selain itu, kasus yang juga terjadi pada AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (*member* dari *BDO International*), karena kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero)

Tbk tahun 2018 terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$ 239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci beberapa kelalaian yang dilakukan, yaitu AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain.

Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan atas penyajian laporan keuangan untuk tahun 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama antara penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi, dianggap telah melanggar Standar Audit (SA) 315. Selanjutnya, AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut dan dianggap telah melanggar SA 500. Terakhir, AP juga dinilai tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi (cnnindonesia.com). Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan sanksi izin selama 12 bulan terhadap auditor laporan keuangan yakni akuntan publik Kasner Sirumpea, dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan tertuang dalam KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 (idntimes.com).

Perilaku disfungsional yang dilakukan auditor akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja PT Garuda Indonesia (Persero). Seperti yang diungkapkan oleh Toto Pranoto selaku pengamat BUMN, bahwa kasus-kasus yang

terjadi di Garuda jelas akan menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menimbulkan reputasi yang buruk sehingga masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan Garuda Indonesia. Garuda juga terancam ditinggal para pemegang saham. Pasalnya, dengan kasus-kasus yang menimpa Garuda membuat investor ragu dengan kinerja perusahaan Garuda (finance.detik.com).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 55 juga telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi Akuntan Publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, rentenan kasus yang menjerat AP dan KAP yang terjadi di Indonesia tersebut menunjukkan adanya penyimpangan atas perilaku audit yang dilakukan oleh para Akuntan Publik atau disebut perilaku disfungsi audit (*dysfunctional audit behavior*). Menurut Havel (2017) disfungsi audit adalah segala bentuk kecurangan, manipulasi, penyimpangan perilaku yang tidak sesuai kode etik akuntan, mengurangi prosedur-prosedur audit, dan perilaku-perilaku lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang

berperilaku disfungsional memiliki tanggung jawab yang lebih rendah dalam menyelesaikan pekerjaan dibandingkan dengan auditor yang tidak berperilaku disfungsional (Rohman, 2018).

Perilaku disfungsional memiliki akibat yang dapat mengarah pada kesalahan pada proses audit lainnya. Ketika kinerja auditor tidak lagi mengikuti standar KAP maka kualitas pekerjaan akan menjadi korban meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pekerjaannya (Tyas, 2015). Ketika auditor menghasilkan laporan audit atas perilaku disfungsional, hal ini akan berdampak pada opini yang dihasilkan auditor pada laporan audit atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan, sehingga akan berakibat pada biasanya penilaian investor atas laporan keuangan perusahaan. Ketika investor menyadari bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan, hal ini akan berakibat pada menurunnya kepercayaan investor untuk melakukan pendanaan pada perusahaan, sehingga perusahaan sebagai pihak *auditee* akan kehilangan sumber pendanaan yang dapat membantu perkembangan perusahaannya. Disisi lain, perilaku disfungsional audit juga akan memberikan konsekuensi terhadap auditor atau Akuntan Publik itu sendiri, dimana atas kelalaian yang dilakukan akan timbul sanksi profesi seperti pembekuan izin atau pembatasan pemberian jasa serta denda yang diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengingat pentingnya kepercayaan pengguna laporan keuangan sehingga auditor dituntut untuk tidak melakukan *dysfunctional audit behavior* dalam

melakukan tugas audit. Auditor yang berperilaku disfungsional memiliki tanggung jawab yang lebih rendah dalam menyelesaikan tugas-tugas audit yang dilakukan, seperti tidak melakukan prosedur audit, mengganti prosedur audit yang telah ditetapkan, hingga tidak melaporkan waktu audit yang sebenarnya, dan perilaku-perilaku lain yang tidak sesuai dengan kode etik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hal ini akan berakibat pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan, sehingga akan membuat para pengguna laporan keuangan mengalami krisis kepercayaan atas hasil laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Maka penelitian ini ingin memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi *dysfunctional audit behavior*.

Faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi *dysfunctional audit behavior* yaitu *time budget pressure*, *locus of control*, komitmen organisasi, *turnover intention* dan *task complexity*. Menurut Sososutiksno (2010) dalam Dewi dan I Wayan (2017) *time budget pressure* merupakan suatu keadaan dimana seorang auditor dituntut melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan dalam anggaran waktu yang sangat ketat dan kaku. Kantor Akuntan Publik sebelum melakukan audit, perlu membuat estimasi waktu yang dibutuhkan (*time budget*). Terbatasnya alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ditambah dengan adanya kesadaran bahwa anggaran waktu digunakan sebagai tolok ukur kinerjanya, menyebabkan stress individual bagi para auditor (Svanstrom, 2016 dalam Rohman, 2018).

Ketika *times budget pressure* yang dirasakan seorang auditor rendah, mengindikasikan auditor memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan setiap jenis tugas audit dan anggaran waktu di KAP tempat auditor bekerja dikomunikasikan dengan baik, sehingga auditor dapat lebih fokus dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas-tugas audit, maka penugasan audit yang dilaksanakan auditor menjadi lebih efisien. Dengan waktu yang diberikan, auditor mampu menyelesaikan tugas-tugas audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, sehingga membuat auditor dapat menyelesaikan setiap jenis tugas sesuai dengan waktu yang dianggarkan, maka auditor akan melaporkan waktu audit sesuai waktu yang sebenarnya digunakan selama penugasan audit dan tidak akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan penugasan audit. Sehingga, semakin rendah *time budget pressure* yang dirasakan auditor, maka semakin rendah pula tingkat *dysfunctional audit behavior* yang akan dilakukan auditor. Hasil dari penelitian Dewi dan I Wayan (2015) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*. Hartanto (2016) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit.

Menurut Medina dan Auliffi (2019) *locus of control* merupakan karakteristik personalitas yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan yang dialaminya. Penelitian ini mengarah kepada *internal locus of control*. Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control internal*. Seseorang dengan *internal locus of control* memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang terjadi berada dalam kontrolnya, selalu mengambil tanggung jawab serta peran dalam mengambil keputusan (Pujaningrum dan Sabeni, 2012 dalam Dewi dan I Wayan, 2015). Menurut Crider, karakteristik yang dimiliki seseorang dengan *locus of control internal* yaitu suka bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan suatu masalah, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin, dan mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin meraih kesuksesan (Ghufron, 2010 dalam Hartanto, 2016).

Ketika seorang auditor memiliki *locus of control* yang tinggi, hal ini mengindikasikan auditor memiliki keyakinan bahwa kegagalan dan keberhasilan berada dalam kontrolnya, auditor juga memiliki keyakinan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil dari kegigihannya dalam bekerja, auditor lebih bertanggungjawab pada setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, auditor juga lebih memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga dengan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas auditnya auditor akan melaksanakan setiap tahapan dalam penugasan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, auditor juga tidak akan menghentikan prosedur audit secara dini tanpa menggantinya dengan prosedur lain, karena auditor merasa perilaku tersebut membuatnya tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan yang dilakukan.

Kegigihan yang dimiliki akan mendorong auditor untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas audit tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga, semakin tinggi *locus of control* yang dimiliki seorang auditor maka semakin rendah pula *dysfunctional audit behavior* yang dilakukan oleh auditor. Hasil dari penelitian Dewi dan I Wayan (2015) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*. Medina dan Auliffi (2019) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa *locus of control* tidak mempunyai pengaruh terhadap *dysfunctional audit*.

Komitmen organisasi menunjukkan hasrat karyawan yang dalam hal ini diartikan sebagai auditor pada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi tempat kerjanya tersebut (Tamara, 2017). Ketika komitmen organisasi yang dimiliki seorang auditor tinggi, mengindikasikan bahwa auditor memiliki keterkaitan secara emosional pada perusahaan, auditor telah menganggap dirinya menjadi bagian keluarga di KAP tempatnya bekerja, dan menjadikan masalah yang terjadi di KAP menjadi permasalahan bagi auditor. Selain itu, auditor juga memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap tinggal pada KAP, sebab auditor merasa KAP tempatnya bekerja telah banyak berjasa bagi auditor karena mendapat dukungan dari KAP untuk mengembangkan profesinya, dan menganggap bahwa dirinya belum memberikan banyak kontribusi bagi KAP tempatnya bekerja. Selain itu, auditor juga mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika auditor meninggalkan KAP. Sehingga sebagai bentuk kontribusinya auditor akan memberikan kinerja yang lebih baik dalam pelaksanaan penugasan audit sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan, serta mendorong auditor untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas audit sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan untuk mempertahankan dirinya auditor akan berusaha untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) selama penugasan audit. Sehingga, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki auditor, maka auditor cenderung tidak akan melakukan *dysfunctional audit behavior*. Hasil dari penelitian Hariani dan Ahmad (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *dysfunctional audit behavior*. Utami dan Dewi (2016) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *dysfunctional audit behavior*.

Turnover intention (keinginan untuk berhenti atau berpindah kerja) mengacu pada niat atau keinginan karyawan untuk mencari alternatif pekerjaan lain (Wayne, *et. al.*, 1997 dalam Basriani, dkk., 2015). Ketika seorang auditor memiliki tingkat *turnover intention* yang rendah, hal ini mengindikasikan rendahnya keinginan dan niat auditor untuk meninggalkan pekerjaan atau KAP tempatnya bekerja, karena auditor merasa bahwa KAP tempatnya bekerja sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, auditor juga memperoleh gaji yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang diberikan dalam menyelesaikan tugas-tugas audit. Kebijakan sistem promosi yang berlaku di KAP tempatnya bekerja juga sangat *fair*, sehingga auditor merasa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan profesinya dalam KAP. Maka, untuk mempertahankan dirinya dalam KAP tempatnya bekerja, auditor akan

memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas-tugas audit yang diberikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, auditor juga akan menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan auditor tidak akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) selama penugasan audit. Hasil dari penelitian Dewi dan I Wayan (2015) menyatakan bahwa *turnover intention* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*. Sedangkan, Medina dan Auliffi (2019) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa *turnover intention* tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsi audit.

Audit menjadi semakin kompleks ketika tingkat kesulitan (*task difficulty*) dan variabilitas tugas (*task variability*) audit semakin tinggi. Kompleksitas tugas merupakan persepsi auditor tentang kesulitan suatu tugas audit yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan auditor untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki untuk pembuatan keputusan (Marganingsih *et al.* 2010 dalam Rohman, 2018), sementara variabilitas tugas didefinisikan sebagai derajat sebuah tugas familiar atau tidak, rutin atau tidak rutin, sering terjadi atau sebaliknya (Rohman, 2018).

Semakin rendah kompleksitas tugas yang dirasakan auditor, mengindikasikan rendahnya suatu ambiguitas serta jelasnya struktur tugas audit yang diterima oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit, auditor mengetahui dengan jelas prosedur-

prosedur dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penugasan audit. Auditor mengetahui tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, bagaimana memulai dan menyelesaikan tugas-tugas audit, auditor juga mengetahui alasan mengapa auditor harus mengerjakan setiap jenis tugas audit yang diberikan. Maka, dengan informasi yang diberikan auditor mampu untuk mengerjakan dan menyelesaikan setiap tahapan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan mendorong auditor untuk dapat menyelesaikan setiap tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dalam pelaksanaan penugasan audit, auditor tidak akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik serta Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan penugasan audit. Sehingga, semakin rendah kompleksitas tugas yang dirasakan auditor, maka semakin rendah pula tingkat perilaku disfungsional yang akan dilakukan oleh auditor. Hasil dari penelitian Dewi dan I Wayan (2015) menyatakan bahwa *task complexity* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi dan I Wayan (2015), perbedaan dengan penelitian yang direplikasi sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini, variabel independen yang ditambahkan adalah *turnover intention* dan komitmen organisasi yang mengacu pada penelitian Basudewa dan Lely (2015).

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah auditor eksternal dengan jabatan minimal senior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Tangerang dan Jakarta. Sedangkan pada penelitian Dewi dan I Wayan (2015), yang dipilih adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

3. Tahun Penelitian

Perubahan periode pengambilan sampel yang diuji yaitu tahun 2020, sedangkan pada penelitian Dewi dan I Wayan (2015) pada tahun 2013.

4. Kuesioner Penelitian

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Harini, 2013), (Adelia, 2016), (Maria, 2019), (Tyas, 2013), (Cendrawati, 2012), dan Kinastri, 2013). Sedangkan pada penelitian Dewi dan I Wayan (2015), kuesioner yang digunakan mengacu pada penelitian (Hutabarat, 2012), (Gustati, 2012), (Engko dan Gudono, 2007), dan (Donnelly, *et al.*, 2005).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran dan beberapa tinjauan terhadap latar belakang dan hasil dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH *TIME BUDGET PRESSURE, LOCUS OF CONTROL, KOMITMEN ORGANISASI, TURNOVER INTENTION, DAN TASK COMPLEXITY* TERHADAP *DYSFUNCTIONAL AUDIT BEHAVIOR*” (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Tangerang dan Jakarta)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan juga tidak menyimpang dari pokok rumusan masalah, maka membatasi permasalahan dengan fokus pada:

1. Periode penelitian tahun 2020.
2. Objek penelitian ini adalah auditor eksternal dengan jabatan minimal senior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Tangerang dan Jakarta.
3. Variabel dependen yang digunakan adalah *dysfunctional audit behavior*. Variabel independen yang digunakan adalah *time budget pressure*, *locus of control*, komitmen organisasi, *turnover intention*, dan *task complexity*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh negatif terhadap *dysfunctional audit behavior*?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *dysfunctional audit behavior*?

4. Apakah *turnover intention* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*?
5. Apakah *task complexity* berpengaruh positif terhadap *dysfunctional audit behavior*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *time budget pressure* terhadap *dysfunctional audit behavior*.
2. Pengaruh negatif *locus of control* terhadap *dysfunctional audit behavior*.
3. Pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap *dysfunctional audit behavior*.
4. Pengaruh positif *turnover intention* terhadap *dysfunctional audit behavior*.
5. Pengaruh positif *task complexity* terhadap *dysfunctional audit behavior*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan analisis penelitian ini, diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan literatur bagi pengembangan ilmu audit mengenai penelitian yang berhubungan dengan

pengaruh *time budget pressure*, *locus of control*, komitmen organisasi, *turnover intention*, dan *task complexity* terhadap *dysfunctional audit behavior*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai pengaruh *time budget pressure*, *locus of control*, komitmen organisasi, *turnover intention*, dan *task complexity* terhadap *dysfunctional audit behavior*. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk Kantor Akuntan Publik agar dapat memahami lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab perilaku disfungsi audit sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan demi kemajuan profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh *time budget pressure*, *locus of control*, komitmen organisasi, *turnover intention*, dan *task complexity* terhadap *dysfunctional audit behavior*. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya bahan kajian untuk penelitian di masa mendatang.

c. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *dysfunctional audit behavior* serta menambah informasi penulis terutama yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan teori-teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan yaitu *auditing*, akuntan publik, dan *theory of attitude change*, hasil penelitian terdahulu yang masih relevan, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis linear berganda.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dirumuskan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.